

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (BD) Dan Fenomena *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan

Muhammad Yasir*, Muhammad Saleh

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

*yasirmuhammad401@gmail.com

Abstract

The aim of research are (1) to know effect partially and simultaneously original local revenues (PAD), revenue sharing funds (DBH), general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK) to regional expenditures (BD) regency/city in South Kalimantan Province, (2) to know occurrence flypaper effect phenomenon regency/city in South Kalimantan Province.

The object of research are 13 autonomous region in South Kalimantan Province (11 regencies and 2 cities). The data of research from DJPK Kemenkeu RI and Bakeuda of South Kalimantan Province. Technical analysis used panel data regression and detection flypaper effect with compare coefficient of PAD to DBH, DAU, DAK.

The result of research showed by partially and simultaneously PAD, DBH, DAU, DAK have significant effect to BD regency/city in South Kalimantan Province on 2004-2017 and no occurrence flypaper effect because coefficient regression of PAD is greater than coefficient regression of DBH, DAU, DAK.

Keywords : *Original Local Revenues, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures, Flypaper Effect*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah (BD) kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan, (2) untuk mengetahui terjadinya fenomena *flypaper effect* kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan.

Objek penelitian adalah 13 daerah otonom di provinsi Kalimantan Selatan (11 kabupaten dan 2 kota). Data penelitian dari DJPK Kemenkeu RI dan Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik analisis menggunakan regresi data panel dan pendeteksian *flypaper effect* dengan membandingkan koefisien PAD terhadap DBH, DAU, DAK.

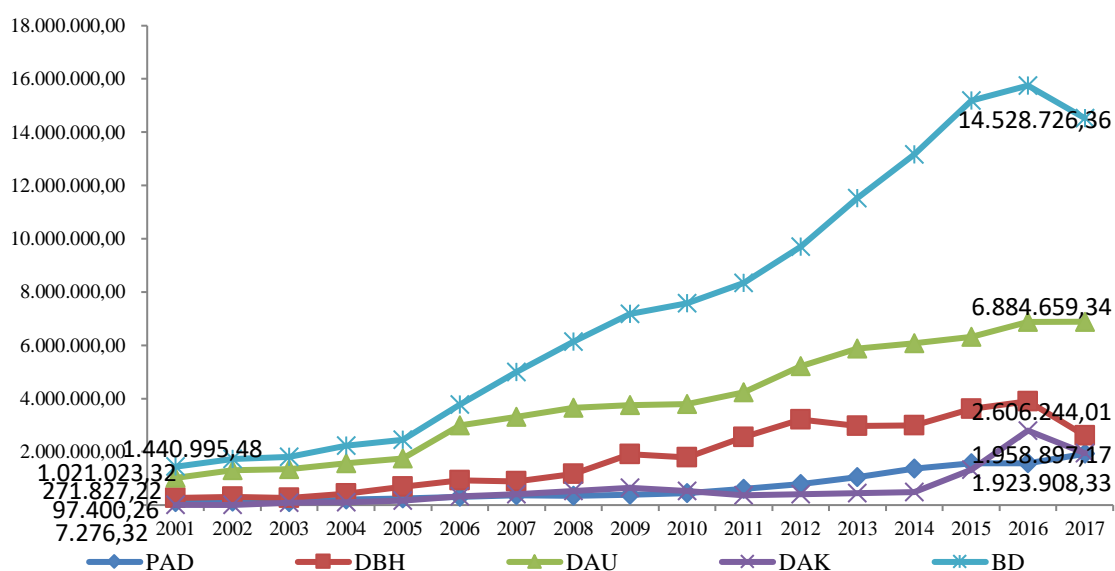
Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial dan simultan, PAD, DBH, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap BD kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2004-2017 dan tidak terjadi *flypaper effect* karena koefisien PAD lebih besar daripada koefisien DBH, DAU, DAK.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah, Flypaper Effect*

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat telah menjadi prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga menghasilkan konsekuensi berupa transfer ke daerah yang tercantum melalui APBD. Pembiayaan APBD terutama dari penerimaan lokal daerah, selain itu terdapat transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan berupa dana perimbangan. Kemampuan penerimaan lokal daerah berupa PAD untuk membiayai pengeluaran daerah lebih kecil daripada transfer ke daerah diproksikan dengan dana perimbangan mengindikasikan terjadinya fenomena *flypaper effect*.

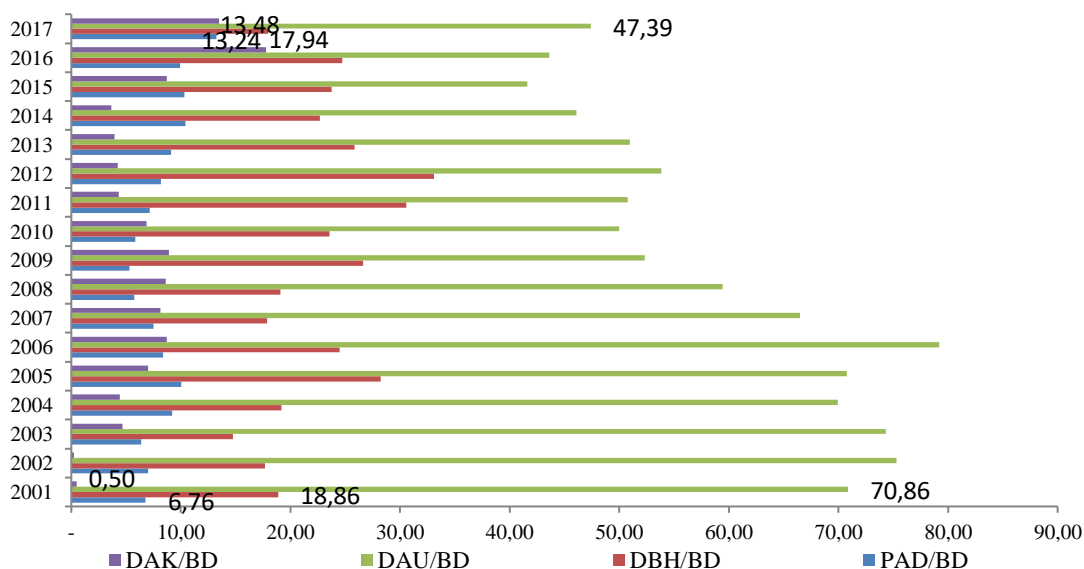
Flypaper effect terjadi karena dominasi pengeluaran daerah yang dibiayai oleh transfer lebih besar dari peran PAD menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan potensi daerah dan celah fiskal cenderung tetap ada secara terus menerus yang terlihat dari analisis statistik deskriptif berupa pada tahun 2001-2014 kabupaten/kota di Indonesia, 87 persen pengeluaran daerah masih berupa transfer dana perimbangan sedangkan PAD tahun 2001 sebesar 7,47 persen sampai tahun 2014 hanya sebesar 12,73 persen (Pratiwi, 2016).



Gambar 1. Perkembangan PAD, DBH, DAU, DAK, dan BD Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001-2017 (Dalam Rupiah)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI dan Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah Kembali)

Berdasarkan gambar grafik diatas, PAD tahun 2001 sebesar 97,4 milyar rupiah dan sampai tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1,923 triliun rupiah, DBH tahun 2001 sebesar 271 milyar rupiah dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 2,606 triliun rupiah, DAU tahun 2001 sebesar 1,021 trilun rupiah dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 6,88 triliun rupiah, DAK tahun 2001 sebesar 7,27 milyar rupiah dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 1,958 triliun, dan belanja daerah tahun 2001 sebesar 1,44 triliun rupiah dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 14,52 triliun rupiah sehingga dapat disimpulkan PAD, DBH, DAU, DAK dan BD mengalami fluktuasi yang meningkat setiap tahunnya selama tahun 2001 sampai tahun 2017, dimana PAD, DBH, DAU, DAK akan mempengaruhi BD karena merupakan sumber-sumber pendanaan BD tersebut.



Gambar 2. Perkembangan Rasio PAD/BD, DAU/BD, DBH/BD, dan DAK/BD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Dalam Persen)

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah Kembali)

Berdasarkan gambar diatas, perkembangan rasio PAD/BD, DBH/BD, DAU/BD, DAK/BD menunjukkan rasio PAD/BD tahun 2001 sebesar 6,76 persen, dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 13,24 persen, rasio DBH/BD sebesar 18,86 pada tahun 2001 dan menjadi 17,94 persen pada tahun 2017, rasio DAU/BD tahun 2001 sebesar 70,86 persen dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 47,39 persen, serta rasio DAK/BD tahun 2001 tahun 2001 sebesar 0,50 persen dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 13,48 persen, maka dapat disimpulkan telah terjadi indikasi *flypaper effect* dimana PAD dalam membiayai BD selama tahun 2001 sampai 2017 kurang dari 20 persen dan nilai rasionya lebih kecil daripada rasio DBH/BD, DAU/BD, dan DAK/BD.

Penelitian mengenai *flypaper effect* dilakukan Mentayani, Hayati, dan Rusmanto, (2012) di provinsi Kalimantan Selatan (11 daerah kabupaten dan 2 kota) menunjukkan secara parsial dan simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan belanja daerah dan tidak terjadi *flypaper effect* karena pengaruh PAD lebih besar daripada DAU, penelitian lebih lanjut oleh Amalia, Nor, dan Nordiansyah (2015) menunjukkan PAD tidak mempunyai pengaruh signifikan pada belanja daerah, DAU dan DAK mempunyai berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan secara simultan DAU dan DAK berpengaruh lebih besar daripada belanja daerah serta terjadi *flypaper effect*. Penelitian lainnya seperti *flypaper effect* di D.I. Yogyakarta oleh Astutik (2016) menunjukkan pengaruh signifikan PAD dan DAU terhadap belanja daerah, DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, terjadi *flypaper effect* karena pengaruh DAU lebih besar daripada PAD dan keduanya signifikan. *Flypaper effect* di Sulawesi oleh Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2017) menunjukkan pada model regresi parsial dan berganda, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, pada regresi parsial ditemukan *flypaper effect* pada DAU dan DBH, sedangkan DAK tidak ditemukan *flypaper effect*. *Flypaper effect* di Jawa Barat oleh Elisabeth (2018)

menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan positif PAD, DAU, dan DAK, sedangkan DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja daerah, terjadi *flypaper effect* karena pengaruh DAU lebih besar daripada PAD.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Apakah terjadi fenomena *flypaper effect* Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui terjadinya fenomena *flypaper effect* Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Kajian Pustaka

- Pemerintahan Daerah

Pemerintah dan dewan rakyat di daerah melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 sesuai prinsip otonomi daerah dan seluas-luasnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut yaitu dengan menjalankan kewajibannya berupa pemberian pelayanan publik, memelihara dan melaksanakan pembangunan di daerah kemudian, mendapatkan hak atau memperoleh pendapatan dengan menarik pajak, memungut retribusi, dan sebagainya (Sarno, 2012).

- Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur mengurus urusan dan kepentingan daerah setempat dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah langkah awal untuk mengarah pada kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat daerah tersebut (Melalolin, Naukoko, dan Lopian, 2016). Otonomi daerah juga menciptakan kehidupan sektor publik yang lebih baik berupa terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi, dan transparansi serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan seluruh aspek kehidupan (Utami dan Syofyan, 2013).

- Desentralisasi Fiskal

Setiap daerah berhak untuk memperoleh sumber-sumber penerimaan potensial untuk meningkatkan pendapatannya, mendapatkan transfer yang lebih besar dan memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan anggaran seperti belanja atau investasi pemerintah daerah yang terdapat dalam suatu pemberian kewenangan melalui desentralisasi fiskal (Muryawan dan Sukarsa, 2016). Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan tujuan memenuhi aspirasi atas penguasaan sumber keuangan negara bagi daerah,

mendorong akuntabilitas daerah, terjaminnya standar pelayanan minimum daerah yang optimal sehingga diharapkan dapat kesejahteraan daerah meningkat (Nurhemi dan Suryani, 2015). Adisasmita (2012) dalam Amalia, Nor dan Nordiansyah (2015) menjelaskan agar daerah dapat menggali dan memaksimalkan PAD dari diberlakukannya desentralisasi fiskal sehingga tingginya PAD yang akan terima maka kebutuhan yang dibiayai PAD akan semakin banyak. Namun, tidak semua kebutuhan daerah harus dipenuhi menggunakan PAD karena tujuan desentralisasi fiskal untuk mendukung kemandirian keuangan daerah yaitu jumlah PAD yang cukup dan keleluasaan menggunakannya dalam membiayai pengeluaran (Simanjuntak, 2003).

- Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah

Transfer pemerintah ke daerah adalah pembagian keuangan pusat menuju daerah yang terbagi atas bagi hasil pendapatan dan bantuan (Iskandar, 2012). Menurut BPPK (2006) dalam (Iskandar, 2012), transfer tersebut terbagi menjadi yaitu (1) transfer tidak bersyarat yaitu transfer untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan memiliki keleluasaan penuh dalam pemanfaatannya, (2) transfer bersyarat yaitu transfer untuk keperluan tertentu yang sangat penting bagi pemerintah daerah terdiri dari transfer pengimbang dan transfer bukan pengimbang, transfer pengimbang yaitu transfer untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan suatu jenis urusan tertentu yang terbagi kembali menjadi transfer pengimbang tidak terbatas dan transfer pengimbang terbatas, sedangkan transfer bukan pengimbang adalah transfer untuk menambah dana penyelenggaraan daerah tanpa menimbang jumlah alokasi dananya besar atau kecil. Transfer bersyarat contohnya adalah dana khusus, dan transfer tidak bersyarat contohnya adalah dana bagi hasil dan dana alokasi umum (Vazquez & Brodjonegoro, 2002).

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah menuntut daerah harus dapat memaksimalkan anggarannya dengan terbentuknya perencanaan keuangan tahunan yang disahkan bersama pemerintah dan dewan rakyat di daerah melalui peraturan daerah yang menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 17. APBD terbagi menjadi 3 struktur utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang terdapat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 22 Ayat 1. Penyusunan APBD diatur oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan menurut (Haryanto, 2008) penyusunan APBD berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kinerja yaitu dengan memperhatikan *input* dan *output* dari program dan kegiatan yang dicapai. Proses akhir APBD menghasilkan *output* untuk melihat informasi penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada penyajian laporan keuangan daerah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas.

- Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah memungut pendapatan diperoleh Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sehingga daerah memperoleh pendapatan asli daerah atau disebut sebagai PAD yang sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18. Halim (2000) dalam Mentayani, Hayati, dan Rusmanto (2012) menyatakan PAD adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber-sumber untuk memperoleh PAD bagi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

- Dana Bagi Hasil

Pendanaan belanja daerah untuk pelaksanaan desentralisasi salah satu sumber utamanya dari penerimaan potensial pemerintah daerah yaitu transfer bagi hasil yang dalam pendapatan APBN yang diperoleh pemerintah pusat di daerah penghasil dengan persentase angka tertentu sehingga disebut sebagai dana bagi hasil atau disebut juga DBH yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21. Direktorat P-APBN (2014:257-258) menjelaskan DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam dimana DBH Pajak berupa DBH PPh (DBH PPh Pasal 25 WPOPND dan PBB Pasal 21), DBH Pajak Bumi dan Bangunan, dan DBH Cukai Hasil Tembakau, sedangkan DBH Sumber Daya Alam yaitu DBH Pertambangan Minyak Bumi, DBH Pertambangan Gas Bumi, DBH Pertambangan Umum, DBH Kehutanan, DBH Perikanan, dan DBH Pertambangan Panas Bumi.

- Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum atau DAU adalah bantuan dana pusat untuk pemerataan dan pengurangan ketimpangan keuangan antar daerah melalui perhitungan tertentu dengan melihat kebutuhan daerah (Oktavia, 2014). Direktorat P-APBN (2014:260-261) menjelaskan DAU diberikan kepada daerah dengan kebijakan-kebijakan meliputi yaitu ditentukan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto APBN, pembagiannya 10 persen bagi provinsi dan 90 persen diberikan ke kabupaten dari besaran DAU secara nasional, dan dianggarkan dengan formula berdasarkan alokasi dasar (kebutuhan gaji pegawai negeri sipil daerah) dan celah fiskal daerah (kebutuhan fiskal meliputi pendanaan daerah diukur melalui jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Bruto per Kapita kemudian dikurangi kapasitas fiskal berupa jumlah PAD, DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam).

- Dana Alokasi Khusus

Transfer DAK digunakan membantu membiayai kegiatan bersifat khusus pada daerah dalam memperlancar urusan pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kegiatan khusus yang dimaksud dalam pembiayaan menggunakan DAK menurut (Solihin, 2006:114) adalah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berada dibawah standar sehingga mendorong percepatan pembangunan daerah. Direktorat P-APBN (2014:264-266) menjelaskan penentuan daerah penerima DAK meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, penentuan besaran DAK setiap daerah ditentukan perhitungan indeks (kriteria umum, khusus, dan teknis), serta bidang DAK tersebut telah terbagi menjadi 19 bidang DAK dari tahun 2011.

- Belanja Daerah

Setiap tahun anggaran pemerintah daerah menganggarkan pengeluaran daerah yang mengurangi kekayaan bersih dalam rangka menjalankan kewajiban daerah sesuai Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pengklasifikasian belanja daerah dalam Permendagri Nomor 13 Tahun meliputi klasifikasi belanja menurut urusan (urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan bagian atau bidang tertentu), menurut fungsi (pelayanan umum, ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial), menurut organisasi (disesuaikan dengan organisasi setiap daerah), menurut program dan kegiatan (sesuai urusan dan kewenangan daerah), dan klasifikasi belanja menurut kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung (pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan tidak terduga) dan belanja langsung (pegawai, barang dan jasa, dan modal).

- Fenomena *Flypaper Effect*

Flypaper Effect adalah respon stimulus dari belanja daerah yang dibiayai pendapatan asli daerah lebih besar daripada belanja daerah dibiayai dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Wulansari, 2015). Kuncoro (2004) menjelaskan *flypaper effect* meningkatkan pajak dan jumlah belanja yang berlebih dan elastisitas belanja terhadap transfer yang tinggi daripada penerimaan pajak daerah. *Flypaper effect* dikelompokkan menjadi dua model yaitu *flypaper effect* model birokratik yang menganalisis *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat, dan *flypaper effect* model *fiscal illusion* yang menganalisis *flypaper effect* akibat dari keterbatasan informasi dari anggaran pemerintah daerah (Kuncoro, 2004). Istilah *flypaper effect* ditemukan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld dalam Kuncoro (2004) menterjemahkan gagasan Arthur Okun (1930) “*money sticks where it hits*”. Dampak atau implikasi dari *flypaper effect* adalah pemerintah daerah memanipulasi anggaran belanja dengan upaya untuk terus mendapatkan transfer yang lebih besar untuk meningkatkan belanja daerah namun tidak berupaya nyata agar penerimaan lokal daerah meningkat berupa PAD sehingga pemerintah daerah terus-menerus memanfaatkan menjadi tergantung terhadap pemerintah pusat (Khoiri, 2015).

Metode

- Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meliputi menganalisis pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus mempengaruhi belanja daerah dan *flypaper effect* kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan.

- Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kemudian tipe penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif.

- Jenis dan Sumber Data

Menurut sifatnya yaitu data kuantitatif, ditinjau dari cara memperoleh datanya merupakan data sekunder, dan menurut waktu pengumpulan datanya merupakan data panel. Sumber data dalam penelitian ini adalah DJPK Kemenkeu RI dan Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan.

- Populasi dan Sampel

Penggunaan populasi dan sampel penelitian berupa *sampling population* atau populasi sampling dimana sampel penelitian adalah seluruh populasi yang berjumlah 13 daerah otonom yaitu 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (kota) di provinsi Kalimantan Selatan.

- Variabel dan Definisi Operasional Variabel

- Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan dari sumber dan potensi lokal sebagai hak untuk menambah pendapatan dan kekayaan daerah. PAD dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah transfer bagi hasil pendapatan untuk daerah atas pajak dan sumber daya alam dari pusat berdasarkan angka persentase. DBH dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan bantuan keuangan pusat berdasarkan formula atau perhitungan tertentu bagi setiap daerah dalam mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. DAU dalam penelitian ini variabel bebas dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan transfer dana bantuan untuk belanja yang bersifat tertentu yang terdapat di daerah. DAK dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah. BD dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

- Fenomena *Flypaper Effect*

Fenomena *flypaper effect* adalah keadaan belanja distimulasi jenis perimbangan menjadi lebih besar daripada belanja yang distimulasi pendapatan asli daerah. *Flypaper effect* dalam penelitian ini dinyatakan dengan perbandingan antara koefisien regresi transfer pemerintah pusat ke daerah dan koefisien regresi pendapatan lokal daerah.

• Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan atau memperoleh data penelitian dengan menggunakan teknik dokumentasi, pendokumentasian data berupa LRA APBD kabupaten/kota tahun 2004-2017 yaitu *browsing* data ke situs DJPK Kemenkeu RI dan meminta data secara langsung ke Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan.

• Teknik Analisis Data

- Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan data penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik deskriptif pada *views* 9.

- Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel adalah teknik regresi yang memuat data panel dari penggabungan data lintas sektor anggota panel dan data deret waktu. Persamaan model regresi data panel penelitian ini yaitu:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DBH_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

BD_{it} = Belanja baerah kabupaten/kota ke- i tahun ke- t

β_0 = Konstanta

PAD_{it} = Pendapatan asli daerah kabupaten/kota ke- i tahun ke- t

DBH_{it} = Dana bagi hasil kabupaten/kota ke- i tahun ke- t

DAU_{it} = Dana alokasi umum kabupaten/kota ke- i tahun ke- t

DAK_{it} = Dana alokasi khusus kabupaten/kota ke- i tahun ke- t

β_1 = Koefisien PAD

β_2 = Koefisien DBH

β_3 = Koefisien DAU

β_4 = Koefisien DAK

i = *Cross section* (kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan)

t = *Time series* (Tahun 2004-2017)

μ_{it} = *Error term* kabupaten/kota ke- i tahun ke- t

Pendekatan regresi data panel terbagi menjadi 3 pendekatan yaitu *pooled least square* (PLS), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) dengan pemilihan pendekatan yaitu uji chow/*redundant test* dan uji haussman.

- Koefisien Determinasi

Untuk menentukan besarnya tingkat kemampuan penjelasan variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, maka digunakanlah pengujian uji determinasi atau juga disebut sebagai uji R^2 .

- Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis secara statistik menggunakan uji t secara parsial dan uji F secara simultan serta mengetahui *flypaper effect* dengan membandingkan hasil koefisien variabel pada uji t dan kelayakan model dari uji F.

Hasil dan Analisis

- Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif
(Dalam Rupiah)

Variabel	Jumlah Data	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi
PAD	182	61.437.678.713,08	321.127.050.909,79	1.755.307.338,50	56.793.411.105,29
DBH	182	162.833.244.825,21	571.335.758.482,00	18.952.227.363,63	119.761.709.276,86
DAU	182	342.111.310.927,55	722.092.250.000,00	57.387.000.000,00	153.757.886.868,00
DAK	182	57.581.321.466,74	322.105.279.402,00	0,00	62.806.449.564,70
BD	182	673.249.072.390,44	1.574.906.727.790,80	70.653.221.117,00	374.920.890.086,26

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan (Data diolah)

- Statistik Deskriptif PAD

PAD menunjukkan jumlah data sebanyak 182 data, nilai rata-rata sebesar Rp61.437.678.713,09, nilai maksimum sebesar Rp321.127.050.909,79 di kota Banjarmasin tahun 2017, nilai maksimum sebesar Rp1.755.307.338,50 di kabupaten Balangan tahun 2005, dan standar deviasi data sebesar Rp56.793.411.105,29.

- Statistik Deskriptif DBH

DBH menunjukkan jumlah data sebanyak 182 data, nilai rata-rata sebesar Rp162.833.244.825,21, nilai maksimum sebesar Rp571.335.758.482,00 di kabupaten Balangan tahun 2016, nilai minimum sebesar Rp18.952.227.363,63 di kabupaten Barito Kuala tahun 2005, dan standar deviasi sebesar Rp119.761.709.276,86.

- Statistik Deskriptif DAU

DAU menunjukkan jumlah data sebanyak 182 data, nilai rata-rata sebesar Rp342.111.310.927,55, nilai maksimum sebesar Rp722.092.250.000,00 di kabupaten Banjar tahun 2016, nilai minimum sebesar Rp57.387.000.000,00 di kabupaten Balangan tahun 2004, dan standar deviasi sebesar Rp153.757.886.868,00.

- Statistik Deskriptif DAK

DAK menunjukkan jumlah data sebanyak 182 data, nilai rata-rata sebesar Rp57.581.321.466,74, nilai maksimum sebesar Rp322.105.279.402,00 di kabupaten Barito Kuala tahun 2016, nilai minimum data sebesar Rp0,00 di kabupaten Tabalong tahun 2013, dan standar deviasi sebesar Rp62.806.449.564,70.

- Statistik Deskriptif BD

BD menunjukkan jumlah data sebanyak 182 data, nilai rata-rata sebesar Rp678.249.072.390,44, nilai maksimum sebesar 1.574.906.727.790,80 di kabupaten Kotabaru tahun 2017, nilai minimum sebesar Rp70.654.221.117,00 di kabupaten Balangan tahun 2004 dan standar deviasi sebesar Rp374.920.890.086,26.

• Analisis Regresi Data Panel

- Pendekatan Regresi Data Panel

Tabel 2
 Hasil Estimasi Pendekatan Regresi Data Panel

Variabel Bebas	Variabel Terikat : Belanja Daerah					
	PLS		FEM		REM	
	Koefisien	Probabilitas	Koefisien	Probabilitas	Koefisien	Probabilitas
Konstanta	-4,61E+10	0,0149	-7,65E+10	0,0007	-4,61E+10	0,0140
Pendapatan Asli Daerah	1,416448	0,0000	1,394372	0,0000	1,416448	0,0000
Dana Bagi Hasil	0,951429	0,0000	0,853129	0,0000	0,951429	0,0000
Dana Alokasi Umum	1,279706	0,0000	1,445901	0,0000	1,279706	0,0000
Dana Alokasi Khusus	0,687084	0,0000	0,529609	0,0000	0,687084	0,0000
Probabilitas <i>F-statistic</i>	0,000000		0,000000		0,000000	
Koefisien Determinasi	0,943970		0,945050		0,943970	

Sumber: Data Diolah

- Pemilihan Pendekatan Regresi Data Panel

Tabel 3
 Hasil Uji Chow/*Redundant Test*

Uji Chow/ <i>Redundant Test</i>	Nilai
Prob. <i>Cross Section F-statistic</i>	0,2288

Sumber: Data Diolah

Tabel 3 menunjukkan prob. *cross section F-statistic* sebesar 0,2288 maka model PLS lebih baik dari model FEM karena lebih dari 0,05.

Tabel 4
 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman	Nilai
Prob. <i>Cross Section Random</i>	0,0420

Tabel 4 menunjukkan prob. *cross section random* sebesar 0,0420 maka model FEM lebih baik dari model REM karena kurang dari 0,05.

- Interpretasi Model Regresi Data Panel

Hasil pemilihan pendekatan menunjukkan *pooled least square* (PLS) adalah model yang terbaik untuk digunakan untuk menginterpretasikan model penelitian ini.

$$\begin{aligned} \text{BD} = & -45896487482,4 + 1,414388931 * \text{PAD} + 0,95104368718 * \text{DBH} \\ & + 1,28024442549 * \text{DAU} + 0,68645545829 * \text{DAK} \end{aligned}$$

• Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil dari tabel 2 sebelumnya maka koefisien determinasi sebesar 0,943850, artinya besarnya tingkat kemampuan variabel bebas yaitu PAD, DBH, DAU, dan DAK mampu menjelaskan sebesar 94,38 persen dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu BD, sedangkan sisanya yaitu sebesar variabel bebas lainnya sebesar 5,62 persen berada diluar persamaan model dalam mempengaruhi variabel terikat tersebut.

• Pengujian Hipotesis

- Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pendekatan *pooled least square* pada tabel 2, prob. PAD sebesar 0,0000. Jika prob. PAD \leq 0,05 atau $0,0000 \leq 0,05$ maka hipotesis pertama menunjukkan H₀₁ ditolak dan H_{a1} diterima.

- Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pendekatan *pooled least square* pada tabel 2, prob. DBH sebesar 0,0000. Jika prob. DBH \leq 0,05 atau $0,0000 \leq 0,05$ maka hipotesis kedua menunjukkan H₀₂ ditolak dan H_{a2} diterima.

- Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pendekatan *pooled least square* pada tabel 2, prob. DAU sebesar 0,0000. Jika prob. DAU $\leq 0,05$ atau $0,0000 \leq 0,05$ maka hipotesis ketiga menunjukkan H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima.

- Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pendekatan *pooled least square* pada tabel 2, prob. DAK sebesar 0,0000. Jika prob. DAK $\leq 0,005$ atau $0,0000 \leq 0,05$ maka hipotesis keempat menunjukkan H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima.

- Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pendekatan *pooled least square* pada tabel 2, prob. F-hitung sebesar 0,0000. Jika prob. F-hitung $\leq 0,05$ atau $0,0000 \leq 0,05$ maka pada hipotesis kelima menunjukkan H_{05} ditolak dan H_{a5} diterima.

- Fenomena *Flypaper Effect*

Berdasarkan pendekatan *pooled least square* (PLS) pada tabel 2, nilai koefisien PAD sebesar 1,416448, koefisien DBH sebesar 0,951429, koefisien DAU sebesar 1,279706, dan koefisien DAK sebesar 0,687084, maka nilai koefisien PAD > DBH atau $1,416448 > 0,951429$, nilai koefisien PAD > DAU atau $1,416448 > 1,279706$, nilai koefisien PAD > DAK atau $1,416448 > 0,687084$ maka hipotesis menunjukkan H_{06} diterima dan H_{a6} ditolak.

Pembahasan

- Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang menunjukkan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Hasil hipotesis pertama yang diuji menunjukkan PAD berpengaruh terhadap BD. Hasil pengujian hipotesis pertama mendukung penelitian dari Mentayani, Hayati,

dan Rusmanto, (2012), Astutik (2016), Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2017), dan Elisabeth (2018).

- Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Dana bagi hasil adalah transfer pusat untuk diberikan kepada daerah penghasil dengan besaran nilai persentase tertentu yang digolongkan sebagai *unconditional grants* atau transfer tak bersyarat yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan DBH mempunyai pengaruh signifikan terhadap BD. Hasil pengujian hipotesis kedua sesuai dengan penelitian Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2018).

- Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi umum merupakan bantuan transfer untuk membiayai pengeluaran daerah agar dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan bersifat *unconditional grants* atau transfer tak bersyarat serta *block grant*. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan DAU memberikan pengaruh signifikan terhadap BD. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini sesuai dengan penelitian Mentayani, Hayati, dan Rusmanto (2012), Amalia, Nor dan Nordiansyah (2015), Astutik (2016), Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2017) dan Elisabeth (2018).

- Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi khusus merupakan transfer ke daerah dalam APBN untuk membiayai belanja daerah bersifat khusus yang termasuk ke dalam *conditional grants* atau transfer tidak bersyarat. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan DAK memberikan pengaruh signifikan terhadap BD. Hipotesis keempat ini sesuai penelitian Amalia, Nor, dan Nordiansyah (2015), Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2018) dan (Elisabeth, 2018).

- Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis kelima menunjukkan model tersebut bersifat *fit* atau telah *fix*, artinya secara simultan PAD, DBH, DAU, dan DAK, berpengaruh signifikan terhadap BD. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Menyatani, Hayati dan Rusmanto (2012).

- Fenomena *Flypaper Effect*

Fenomena *flypaper effect* adalah respon belanja daerah dibiayai oleh dana transfer pusat lebih besar daripada respon belanja daerah dibiayai menggunakan penerimaan asli daerah. *Flypaper effect* dibedakan berdasarkan jenis transfernya yaitu *flypaper effect* kondisi *unconditional grants* dan *flypaper effect* kondisi *conditional grants*. Pengujian hipotesis keenam memperlihatkan tidak terjadi *flypaper effect* karena respon PAD lebih besar daripada respon DBH, DAU, dan DAK, terlihat dari perbandingan antara $\beta_1\text{PAD}_{it}/\beta_2\text{DBH}_{it}$ sebesar 1,49 kali lebih besar, $\beta_1\text{PAD}/\beta_3\text{DAU}_{it}$ sebesar 1,10 kali lebih besar, dan $\beta_1\text{PAD}_{it}/\beta_4\text{DAK}_{it}$ sebesar 2,06 kali lebih besar. Pengujian hipotesis keenam sesuai dengan penelitian Menyatani, Hayati, dan Rusmanto, (2012) dan Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2018).

Penutup

- Implikasi Penelitian

- Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan peningkatan kemandirian dan kapasitas fiskal keuangan daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan belanja yang dibiayai menggunakan PAD seperti pemeliharaan infrastruktur milik pemerintah daerah meliputi jalan, jembatan, pasar, dan gelanggang olahraga serta belanja daerah

untuk pelayanan publik serta belanja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan ketertiban dan keamanan agar kesejahteraan dapat tercapai.

- Dana Bagi Hasil

Meningkatnya dana bagi hasil maka meningkatkan kapasitas fiskal daerah sama halnya dengan PAD sehingga pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran belanjanya menjadi lebih besar karena sifatnya yang tidak bersyarat terutama untuk dianggarkan ke dalam belanja modal seperti yang dikemukakan oleh Mulyati dan Yusriadi (2017).

- Dana Alokasi Umum

Penggunaan DAU meningkatkan pengeluaran belanja menjadi besar karena merupakan *unconditional grants* sama halnya dengan DBH dan bersifat *block grants* serta jumlah yang diterima sangat besar sehingga pengeluaran belanja pemerintah daerah terus meningkat setiap tahunnya, Afrizawati (2012) menambahkan implikasi DAU mengakibatkan tidak maksimalnya PAD.

- Dana Alokasi Khusus

Peningkatan DAK menyebabkan belanja meningkat lebih besar karena membiayai belanja bersifat khusus yang merupakan bagian utama dari total belanja daerah dan berperan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkannya seperti melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pertanian, perumahan dan pemukiman, serta listrik pedesaan dan sebagainya.

- Fenomena *Flypaper Effect*

Tidak terjadinya *flypaper effect* menyebabkan kondisi fiskal/keuangan daerah tersebut berada pada keadaan baik dan aman karena terbebas dari *flypaper effect* atau juga disebut “efek kertas melayang”, hal ini ditandai dengan terus meningkatnya

pendapatan asli daerah sehingga kemandirian keuangan daerah dan berkurangnya ketergantungan transfer ke daerah sehingga daerah menjadi lebih responsif dan menstimulus belanja daerah dibiayai menggunakan PAD serta diharapkan dapat menghindari *flypaper effect* agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pajak lokal utamanya dan pengurangan/bantuan pemerintah pusat ke daerah.

- **Keterbatasan Penelitian**

1. Tahun penelitian ini hanya dari 2004-2017, tidak dari tahun 2001-2017, hal ini karena adanya pemekaran wilayah pada kabupaten Kotabaru menjadi kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi kabupaten Balangan antara tahun 2001-2003 sehingga tahun 2004 jumlah daerah otonom di provinsi Kalimantan Selatan telah menjadi sebanyak 13 (tiga belas) daerah otonomi dari yang sebelumnya hanya 11 daerah selama tahun 2001-2003.
2. Variabel terikat penelitian yaitu belanja daerah hanya belanja total keseluruhan, sehingga *flypaper effect* yang dianalisis masih bersifat umum, tidak menunjukkan secara spesifik *flypaper effect* pada jenis-jenis belanja daerah tertentu seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
3. Teknik analisis tidak menggunakan secara spesifik dengan menggunakan analisis regresi berganda *time series* pada setiap kabupaten dan kota, sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya menggambarkan keadaan *flypaper effect* secara umum menggunakan regresi data panel.

- **Kesimpulan Penelitian**

1. Secara parsial atau masing-masing pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004-2017.
2. Secara simultan atau bersama-sama pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004-2017.
3. Tidak terjadi fenomena *flypaper effect* kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2004-2017 karena koefisien penerimaan lokal daerah yaitu PAD lebih besar dari koefisien transfer pusat yaitu DBH, DAU, dan DAK.

- **Saran Penelitian**

1. Pengelolaan keuangan daerah harus menjadi lebih baik lagi bagi pemanfaatan dana transfer dan penerimaan lokal daerah, maka diharapkan pemerintah daerah supaya terus berupaya mewujudkan kemandirian keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal dengan memperluas basis pajak daerah daerah dan diharapkan pemerintah daerah agar tidak menaikkan tingkat pajak agar tidak dapat mencapai pajak yang dicapai dapat sesuai target, memperluas basis-basis pungutan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan BUMD, dan meningkatkan PAD yang sah lainnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis fenomena *flypaper effect* dari jenis-jenis belanja daerah agar dapat menganalisis lebih mendalam mengenai *flypaper effect* tersebut seperti *flypaper effect* dari bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat berpengaruh seperti dana hibah atau sejenis transfer lainnya maupun juga variabel bebas yang bersifat kualitatif lainnya seperti kebijakan institusional pemerintah daerah, kebijakan penggunaan anggaran daerah, dan sebagainya, kemudian

menggunakan analisis regresi berganda agar dapat menganalisis secara rinci pada setiap daerah otonom yang ada di provinsi Kalimantan Selatan.

Daftar Referensi

- Afrizawati. (2012). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, 2(1), 21–30.
- APBN, D. P. (2014). *Dasar-Dasar Praktek APBN Penyusunan APBN di Indonesia*. (Purwiyanto; Kunta W.W. Nugraha, Ed.) (Edisi II). Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Armawaddin, M., Aya, W., & Nur, M. (2018). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Flypaper Effect Analysis of District and City Regionally Spending in Sulawesi Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91.
- Astutik, E. N. P. (2016). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2008-2014*. Yogyakarta: Univeristas Sanata Dharma.
- Elisabeth. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat*. Yogyakarta: Univeristas Sanata Dharma.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja* (Edisi Pert). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, R., Khoiri, A., Silaturahmi, F., Ekonomi, S., Expenditure, G. L., & Daerah, B. (2015). Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Signifikan*, 4(2), 211–230.
- Indonesia, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2004).

Jakarta: Republik Indonesia.

Indonesia, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). Jakarta.

Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2005), 113–131.

Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 47–63.

Lapian, M. L. M. A. T. N. A. L. C. P. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 536–548.

Martinez-vazquez, J., & Brodjonegoro, B. (2002). An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospects. In *Can Decentralization Help Rebuild in Indonesia?* (hal. 1–53). Atlanta: Georgia State University.
<https://doi.org/10.4337/9781845421656.00015>

Mendagri. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2006). Jakarta, Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.

Mulyati, S., & Yusriadi. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. *Jurnal EKonomi dan Bisnis*, 1(2), 211–220.
<https://doi.org/10.22236/agregat>

Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(5), 229–252.

Nordiansyah, W. R. A. W. N. M. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013).

Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 15(1), 1–12.

Oktavia, D. (2014). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntan Universitas Jember*, 12(2), 1–16.

Pratiwi, A. P. D. R. (2016). Petani Garam vs Impor Garam Indikasi Besarnya Ketergantungan Belanja Daerah terhadap Dana Perimbangan. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, 1(September), 12.

R, N. G. S. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 183–206.

Rusmanto, I. M. N. H. ; R. (2012). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, 2(1), 55–64.

Sarno. (2012). Analisis Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mencapai Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2011. *Jurnal Ilmiah Magister Ekonomi*, 1–14.

Simanjuntak, R. A. (2003). *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi*.

Solihin, D. (2006). *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Artifa Duta Perkasa.

Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA*, 1(1), 63–86.

Wulansari, D. T. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–16.